

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media : *Kabar Sampit* Halaman : 4

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

PAD 2020 Tak Capai Target

DPRD Minta Unit Usaha Dievaluasi

SAMPIT - Ketua Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Syahbana menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kotim untuk melakukan evaluasi kinerja setiap unit kerja dan usaha.

Pasalnya ujar Syahbana, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim tahun 2020 lalu tidak tercapai sesuai target. Sehingga perlu adanya inovasi untuk meningkatkan PAD di tahun 2021 ini.

Ditegaskannya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan Bupati Kotim pada 21 Juni 2021 lalu merupakan muara bagi perwujudan dari pemerintahan yang

Peran dari BUMD masih belum mampu berikan kontribusi signifikan terhadap PAD, Pemkab Kotim dinilai masih belum optimal dan kreatif mengelola BUMD,"

SYAHBANA

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kotim

baik (Good Governance).

"Esensi ini dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan, apabila dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan responsif. Melalui tata cara ini akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif dan akurat atas kinerja setiap program, kegiatan dan kebijakan," ujarnya.

Disamping itu, pihaknya juga me-

nyampaikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi Pemerintah Kabupaten Kotim mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk yang ke - 7 kalinya.

Disebutkan, realisasi PAD 2020 sebesar Rp.232.885.875.083,89 atau sebesar 55,70 persen dari target sebesar Rp 418.095.783.674,00 atau kurang sebesar 44,30 persen. Dari laporan yang pihaknya pelajari pada realisasi pajak daerah yang paling kecil penerimaannya yaitu hanya 24,89 persen.

"Biasanya pajak daerah selalu mendominasi dalam pendapatan asli daerah, khususnya kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Fraksi kami meminta penjelasan kendala apa saja yang menyebabkan rendah penerimaan

pajak daerah ini," tegasnya.

Terhadap rendahnya realisasi PAD 2020, Fraksi Nasdem menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kotim yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru untuk melakukan evaluasi kinerja disetiap unit kerja atau usaha, sehingga dengan cepat dapat diketahui kendala-kendala yang menghambat peningkatan pendapatan asli daerah.

"Dari pidato Bupati Kotim, fraksi kami tidak menemukan penjelasan atau laporan besaran kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kotim dalam peningkatan PAD," kata Syahbana. "Peran dari BUMD masih belum mampu berikan kontribusi signifikan terhadap PAD, Pemkab Kotim dinilai masih belum optimal dan kreatif mengelola BUMD," timpalnya. (ang/fm)